

MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE : EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN**Wilma Silalahi¹, Eugene Ranga NovanDria²****Email :** wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, eugenedria10@gmail.com**Fakultas Hukum , Fakultas Hukum****Abstract**

Social commerce is a rapidly growing business model that leverages social media platforms for marketing, interaction, and transactions. However, this growth is accompanied by heightened financial risks, particularly the potential for employee-perpetrated fraud. This study aims to assess the implementation of internal controls as a means to mitigate financial risk and prevent fraud within social commerce businesses. The assessment involved identifying potential fraud risks, evaluating the effectiveness of internal control procedures, and analyzing key elements such as the segregation of duties, transaction authorization, supervision, and financial record-keeping. The findings indicate that robust internal controls supported by consistent supervision, transparency, restricted access to financial information and transactions, and clear authorization procedures can reduce the likelihood of fraud and minimize financial losses. Consequently, strengthening internal control systems is a crucial step toward enhancing transaction security, safeguarding assets, and ensuring the sustainability of social commerce businesses.

Keywords : *Social Commerce, Financial Risk Mitigation, Internal Control, Fraud, Employees, Risk Management.*

Abstrak

Social commerce adalah suatu model usaha yang secara cepat berkembang dengan memanfaatkan platform media sosial untuk kegiatan pemasaran, interaksi, dan transaksi. Namun, pertumbuhan ini diiringi dengan meningkatnya risiko finansial, terutama kemungkinan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan kontrol internal sebagai langkah mitigasi untuk risiko finansial dan pencegahan tindakan penipuan di dalam bisnis social

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

commerce. Penilaian dilakukan dengan mengenali kemungkinan kecurangan, mengevaluasi keberhasilan prosedur kontrol internal, serta menganalisis elemen pemisahan tanggung jawab, otorisasi transaksi, pengawasan, dan pencatatan keuangan. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kontrol internal yang baik, didukung oleh pengawasan yang konsisten, keterbukaan, pembatasan akses pada informasi dan transaksi finansial, serta penerapan prosedur otorisasi yang jelas, mampu menurunkan kemungkinan terjadinya fraud dan meminimalkan dampak kerugian finansial. Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol internal menjadi langkah krusial dalam meningkatkan keamanan transaksi, melindungi aset, dan mendukung keberlanjutan dalam bisnis social commerce.

Kata kunci : Social Commerce, Mitigasi Risiko Keuangan, Pengendalian Internal, Fraud, Karyawan, Manajemen Risiko.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perkembangan dalam teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap sektor bisnis, termasuk munculnya social commerce sebagai format penjualan yang menggabungkan kegiatan media sosial dengan pemasaran, komunikasi, dan transaksi jual beli. Social commerce memungkinkan para pengusaha menggunakan platform digital untuk mencapai konsumen dengan cakupan yang lebih luas, menciptakan interaksi langsung, serta mempercepat transaksi. Kemudahan ini membuka peluang bagi usaha untuk berkembang dengan biaya operasional yang relatif rendah. Namun, semakin rumitnya aktivitas bisnis berbasis digital juga menimbulkan beragam risiko, terutama risiko finansial yang terkait dengan manajemen transaksi, penerimaan pembayaran, pengeluaran, dan pencatatan keuangan.

Dalam kegiatan social commerce, transaksi keuangan mungkin melibatkan beberapa pihak, termasuk pemilik usaha, staf karyawan, konsumen, penyedia jasa pembayaran, serta platform digital. Situasi ini mengharuskan perusahaan memiliki sistem pengelolaan keuangan yang teratur sehingga setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Jika proses penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang tidak diawasi dengan baik, ada kemungkinan munculnya kesalahan atau tindakan penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko finansial menjadi elemen yang sangat penting dalam mempertahankan stabilitas dan kelangsungan usaha social commerce.

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Pegawai memiliki peranan krusial dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, sehingga dalam situasi tertentu, mereka dapat mengakses informasi, sistem transaksi, serta sumber daya keuangan. Akses ini dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan seperti manipulasi transaksi, penggelapan dana, penyalahgunaan sumber daya

perusahaan, pemalsuan informasi, atau penggunaan akun bisnis untuk kepentingan pribadi. Potensi kecurangan ini semakin penting untuk diperhatikan ketika perusahaan memiliki sistem pengawasan yang lemah dan pembagian tanggung jawab yang tidak jelas.

Kecurangan oleh pegawai tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemilik bisnis, pelanggan, dan pihak lain yang terlibat dengan perusahaan. Kerugian yang dihasilkan dari kecurangan bisa berupa hilangnya aset, laporan keuangan yang tidak akurat, gangguan arus kas, sampai meningkatnya biaya untuk audit dan perbaikan sistem. Dalam dunia bisnis social commerce, konsekuensi tersebut dapat menjadi lebih rumit karena transaksi dan komunikasi lebih banyak dilakukan melalui

platform digital. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai titik yang bisa menjadi celah bagi terjadinya kecurangan dan mengambil langkah pencegahan dari awal.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menurunkan risiko tersebut adalah dengan menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk membantu organisasi dalam melindungi aset, memastikan keakuratan informasi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Dalam dunia social commerce, pengendalian internal dapat direalisasikan melalui pemisahan tugas, pembatasan akses sistem, otorisasi transaksi, rekonsiliasi keuangan, pencatatan transaksi, serta pengawasan aktivitas karyawan secara rutin.

Keefektifan pengendalian internal sangat tergantung pada seberapa baik perusahaan mampu menyesuaikan prosedur pengawasan dengan sifat bisnis digital. Sistem pengendalian yang hanya bergantung pada pemeriksaan manual dapat mengalami tantangan ketika perusahaan harus mengelola transaksi dalam jumlah besar dan dalam waktu yang cepat. Maka dari itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengendalian, seperti pencatatan transaksi secara otomatis, penerapan autentikasi berlapis, pemberian hak akses yang disesuaikan dengan tanggung jawab, serta pemantauan aktivitas pengguna dalam sistem. Kombinasi antara pengendalian administratif dan teknologi dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian transaksi dengan lebih cepat.

Selain sistem dan teknologi, aspek manusia juga memainkan peran vital dalam implementasi pengendalian internal. Para karyawan harus mengerti prosedur keuangan, batasan wewenang, serta dampak dari pelanggaran yang mungkin terjadi. Perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Melakukan pengawasan secara rutin dan menyediakan saluran pelaporan yang aman dapat membantu perusahaan mendapatkan informasi terkait indikasi penipuan. Dengan demikian, pencegahan penipuan tidak hanya tercermin dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari konsistensi dalam menerapkan dan mengawasi aturan tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, penilaian terhadap pengendalian internal menjadi krusial untuk memahami sejauh mana mekanisme yang diterapkan dapat mengenali dan

mengurangi risiko penipuan oleh karyawan dalam bisnis social commerce. Studi tentang “Mitigasi Risiko Keuangan pada Bisnis Social Commerce: Evaluasi Pengendalian Internal terhadap Potensi Fraud oleh Karyawan” diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai berbagai risiko keuangan yang mungkin timbul, kelemahan dalam pengendalian yang bisa dieksploitasi, serta langkah-langkah peningkatan pengendalian internal yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis social commerce dalam memperkuat keamanan pengelolaan keuangan, mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, serta mendukung keberlanjutan dan kredibilitas bisnis di dunia digital.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka untuk menyelidiki pengurangan risiko keuangan dalam bisnis social commerce dan menilai sistem pengendalian internal terkait potensi penipuan oleh karyawan. Informasi penelitian diperoleh dari beragam sumber sekunder, seperti jurnal akademis, buku, artikel penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan pengendalian internal, manajemen risiko keuangan, social commerce, serta penipuan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai jenis risiko keuangan dan kemungkinan kecurangan yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis social commerce, lalu menilai efektivitas elemen pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, langkah pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan aktivitas. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan membandingkan ide dan penemuan dari berbagai sumber untuk menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan merancang langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya penipuan oleh karyawan serta mengurangi dampak kerugian finansial dalam bisnis social commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DATA Umum

1. Perkembangan Bisnis Social Commerce

Social commerce adalah evolusi dari model jual beli digital yang mengintegrasikan aktivitas transaksi dengan media sosial sebagai alat untuk pemasaran, komunikasi, dan interaksi dengan pelanggan. Dalam skema bisnis ini, pelanggan dapat mengakses informasi tentang produk melalui konten digital, berinteraksi dengan penjual, memberikan feedback, melakukan pemesanan, hingga menyelesaikan transaksi melalui lingkungan digital. Inovasi ini mempermudah pengusaha untuk meraih audiens yang lebih luas tanpa harus mengandalkan jaringan toko fisik yang besar. Selain itu, media sosial memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dengan pelanggan lewat komunikasi yang langsung dan cepat.

Namun, kemajuan dalam social commerce juga menambah tingkat kompleksitas dalam manajemen finansial. Banyaknya transaksi, kecepatan proses pembayaran, variasi metode pembayaran, serta keterlibatan beberapa staf dalam operasional meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, pertumbuhan bisnis digital

perlu diiringi oleh peningkatan dalam sistem kontrol internal. Perusahaan tidak hanya perlu fokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga harus memastikan bahwa pertumbuhan jumlah transaksi bersinergi dengan sistem pencatatan, pengawasan, dan perlindungan aset yang layak. Tanpa pengendalian yang memadai, lonjakan aktivitas bisnis dapat berpotensi menambah risiko keuangan dan penipuan.

2. Karakteristik Transaksi dalam Bisnis Social Commerce

Transaksi dalam bidang social commerce memiliki sifat yang cepat, lincah, dan mayoritas dilaksanakan melalui platform digital. Para konsumen dapat menemukan barang melalui konten di media sosial, berinteraksi dengan penjual, melakukan pemesanan, serta menyelesaikan pembayaran tanpa perlu bertatap muka langsung. Dari perspektif perusahaan, setiap kegiatan ini menghasilkan data yang perlu dikelola dengan efisien, mencakup informasi pelanggan, jumlah order, harga barang, proses pembayaran, pengiriman, hingga pengembalian dana. Banyaknya langkah dalam rangkaian transaksi menuntut perusahaan memiliki sistem yang dapat menghubungkan semua aktivitas tersebut agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi.

Kompleksitas ini bisa menjadi titik lemah jika perusahaan tidak menerapkan kontrol yang tepat. Misalnya, data penjualan yang tercatat dalam sistem bisa berbeda dengan jumlah uang yang diterima jika proses rekonsiliasi tidak dilakukan secara teratur. Begitu pula dengan proses pengembalian dana, pembatalan order, atau pemberian potongan harga yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara nilai penjualan dan penerimaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap langkah dalam transaksi perlu disertai prosedur pengendalian yang terperinci. Kontrol harus memastikan bahwa proses transaksi dapat dilacak dari awal hingga akhir, sehingga jika ada perbedaan, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber masalah dan pihak yang bertanggung jawab atas proses tersebut.

3. Risiko Keuangan dalam Bisnis Social Commerce

Dalam pengelolaan usaha social commerce, risiko finansial merupakan salah satu hal utama yang harus diperhatikan. Risiko ini bisa timbul dari kesalahan pencatatan transaksi, kehilangan uang, pengeluaran yang tidak sesuai anggaran, pengaturan harga yang curang, transaksi yang tidak nyata, penyalahgunaan penerimaan, hingga penggunaan fasilitas perusahaan secara tidak benar. Risiko ini dapat meningkat jika perusahaan mengalami volume transaksi yang besar, namun sistem pemantauan yang ada masih terbatas. Hal ini bisa membuat pemilik usaha sulit untuk memeriksa setiap transaksi secara manual, sehingga potensi adanya kesalahan transaksi tidak dapat terdeteksi dengan cepat.

Secara mendalam, penting bagi perusahaan untuk menyadari bahwa risiko keuangan tidak hanya muncul dari luar, seperti gagal bayar atau masalah pada sistem, tetapi juga berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Karyawan yang mempunyai akses ke sistem dan dana perusahaan bisa menjadi sumber risiko jika pengendalian yang layak tidak diterapkan. Oleh karena itu, identifikasi risiko harus mencakup semua tahap bisnis, termasuk tindakan yang dilakukan oleh staf. Perusahaan harus menilai kegiatan yang berisiko tinggi, mengkalkulasi dampaknya, serta menetapkan langkah-langkah pengendalian yang sesuai.

Dengan cara ini, manajemen risiko dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan tidak hanya reaktif setelah terjadinya kerugian.

4. Peran Karyawan dalam Operasional Social Commerce

Karyawan memainkan peran yang sangat krusial dalam melaksanakan kegiatan bisnis social commerce. Mereka bertugas untuk mengelola akun di media sosial, menerima pesanan, memberikan layanan kepada konsumen, mengkonfirmasi pembayaran, mengemas produk, mencatat transaksi, mengelola pengembalian dana, hingga membuat laporan keuangan. Tingginya keterlibatan karyawan menjadikan mereka komponen vital dalam kesuksesan operasional perusahaan. Namun, tingkat keterlibatan ini juga memberi mereka akses terhadap aset, data, dan informasi yang memiliki nilai signifikan bagi perusahaan.

Memberikan akses kepada karyawan sebenarnya adalah suatu kebutuhan operasional, namun akses tersebut harus sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Memberikan kewenangan yang terlalu luas dapat memperbesar resiko terjadinya penyalahgunaan. Contohnya, seorang karyawan yang dapat menerima pembayaran sambil memodifikasi data transaksi dan melakukan pengembalian dana akan memiliki peluang lebih besar untuk menutupi penyimpangan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan prinsip hak akses minim, yaitu memberikan akses hanya sebatas yang diperlukan untuk menjalani tugas. Selain itu, perilaku karyawan juga harus dipantau secara rutin agar perusahaan dapat mendeteksi jika ada aktivitas yang menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

5. Potensi Penipuan oleh Karyawan

Penipuan yang dilakukan oleh karyawan dapat muncul dalam banyak cara, baik secara langsung maupun lewat manipulasi sistem dan dokumen. Contoh dari penipuan ini termasuk pencurian uang dari penjualan, penyuntingan data transaksi, pemalsuan bukti pembayaran, penyalahgunaan proses pengembalian, pemakaian akun perusahaan untuk keuntungan pribadi, modifikasi diskon, hingga pengeluaran dana tanpa izin. Risiko ini semakin meningkat ketika pegawai memiliki akses besar dan pengawasan dari perusahaan tergolong rendah. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk melihat penipuan sebagai ancaman nyata yang perlu dikelola melalui penetapan sistem pencegahan dan kegagalan.

Saat menilai potensi penipuan, perusahaan juga harus mempertimbangkan adanya interaksi antara peluang, tekanan, dan rasionalisasi yang bisa memicu seseorang melakukan kecurangan. Namun, adanya kondisi tersebut tidak menjamin bahwa karyawan tertentu akan terbukti melakukan penipuan. Jadi, sistem pengendalian internal sebaiknya tidak didasarkan pada keyakinan bahwa semua pegawai adalah tidak dapat dipercaya, melainkan berlandaskan prinsip bahwa sistem harus mampu mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pendekatan ini lebih objektif karena menjadikan pengendalian sebagai alat perlindungan bagi perusahaan serta merinci tanggung jawab pegawai.

6. Pengendalian Internal sebagai Upaya Pencegahan

Sistem pengendalian dalam organisasi adalah alat kunci yang digunakan untuk menghindari dan mendeteksi penipuan. Pengendalian ini dapat dilaksanakan melalui pemisahan tugas, persetujuan dalam transaksi, batasi akses, dokumentasi, rekonsiliasi, serta pemantauan yang efektif. Dalam konteks bisnis social commerce, penting bagi pengendalian internal untuk menjangkau seluruh proses transaksi, mulai dari penerimaan pesanan hingga pencatatan penerimaan uang. Setiap transaksi harus dilengkapi dengan bukti yang dapat ditelusuri untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang ada.

Keberhasilan pengendalian internal tidak hanya bergantung pada adanya dokumen dan aturan yang jelas, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam aktivitas sehari-hari. Sebuah perusahaan mungkin memiliki prosedur yang menyeluruh, tetapi jika karyawan dapat mengesampingkannya tanpa pengawasan, maka pengendalian itu tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua prosedur dipahami oleh karyawan, diterapkan dengan konsisten, dan dievaluasi secara rutin. Pengendalian juga perlu diperbaharui jika ada perubahan dalam teknologi, sistem pembayaran, struktur organisasional, atau jumlah transaksi yang berlangsung.

7. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengendalian Internal

Perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internalnya dengan menggunakan teknologi untuk otomatisasi pencatatan dan pemantauan transaksi. Sistem digital bisa diimplementasikan untuk mengatur hak akses, mendokumentasikan aktivitas pengguna, memberikan notifikasi terkait transaksi tertentu, dan menghasilkan laporan secara otomatis. Dengan adanya jejak audit, perusahaan dapat melacak siapa yang melakukan modifikasi data, kapan dilakukan, dan jenis modifikasi yang terjadi. Data ini sangat berguna bagi perusahaan dalam melakukan pemeriksaan jika terjadi ketidakcocokan dalam transaksi.

Namun, teknologi tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya solusi untuk mencegah penipuan. Sistem digital masih menyimpan risiko, terutama jika pengaturan hak aksesnya tidak akurat, akun digunakan secara bersama, kata sandi dibagikan, atau data tidak diperiksa secara teratur. Selain itu, seiring dengan semakin terintegrasinya sistem digital, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan tata kelola keamanan yang memadai. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan pengawasan manusia, kebijakan keamanan informasi, pemeriksaan berkala, serta prosedur pemulihan jika terjadi penyalahgunaan. Kombinasi antara teknologi dan pengawasan dari manusia akan menciptakan sistem pengendalian yang lebih menyeluruh.

1. Manipulasi Data Transaksi oleh Karyawan

Kegiatan mengubah data transaksi adalah salah satu tantangan spesifik yang mungkin muncul ketika pegawai diberi wewenang untuk memasukkan, merubah, atau menghapus informasi penjualan. Manipulasi ini bisa berupa perubahan harga, jumlah barang, status pembayaran, penerapan diskon yang tidak sah, atau penghapusan transaksi tertentu. Jika modifikasi tersebut tidak tercatat dalam sistem, perusahaan akan kesulitan untuk mengetahui kapan dan siapa yang melakukan perubahan tersebut. Konsekuensinya tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga dapat membuat laporan keuangan menjadi tidak akurat.

Untuk meminimalkan risiko ini, perusahaan perlu menerapkan batasan hak akses sesuai dengan tanggung jawab pegawai. Sistem seharusnya dilengkapi dengan jejak audit yang merekam setiap modifikasi data sehingga aktivitas dapat ditelusuri. Selain itu, perubahan pada transaksi tertentu sebaiknya memerlukan persetujuan dari pihak lain. Pengendalian ini menjadi semakin krusial ketika perusahaan menghadapi volume transaksi yang tinggi karena pemeriksaan manual atas seluruh transaksi menjadi sulit dilakukan. Dengan menggabungkan pembatasan akses, pencatatan aktivitas, dan pemeriksaan berbasis risiko, perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi manipulasi data.

2. Penggelapan Dana Hasil Penjualan

Penggelapan dana dari penjualan bisa terjadi saat pegawai dengan akses ke penerimaan tidak menyetorkan seluruh uang ke perusahaan. Risiko ini muncul karena terdapat perbedaan antara total transaksi yang tercatat dan jumlah uang yang diterima di rekening perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan pemeriksaan secara teratur, ketidaksesuaian ini bisa berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Tindakan penggelapan juga dapat disembunyikan melalui penipuan dalam pencatatan, seperti mengurangi nilai transaksi atau mengubah status dari pembayaran.

Sistem pengendalian yang bisa diterapkan meliputi melakukan pemeriksaan antara laporan penjualan, data pembayaran, rekening bank, dan catatan akuntansi. Proses rekonsiliasi sebaiknya dikerjakan oleh individu yang berbeda dari pegawai yang mengelola penerimaan. Selain itu, perusahaan juga bisa memanfaatkan sistem pembayaran terintegrasi agar penerimaan lebih mudah dilacak. Audit juga harus dilaksanakan secara rutin untuk memastikan tidak ada kesenjangan yang tidak bisa dijelaskan. Dengan cara ini, pengendalian tidak hanya tertuju pada pencatatan transaksi, tetapi juga menjamin bahwa dana benar-benar diterima oleh perusahaan.

3. Penyalahgunaan Proses Pengembalian Dana

Prosedur pengembalian dana adalah salah satu aktivitas yang memiliki potensi risiko yang tinggi sebab berhubungan langsung dengan keuangan perusahaan. Pegawai yang memiliki wewenang untuk menjalankan proses pengembalian dana bisa menyalahgunakan akses

tersebut dengan melakukan pengembalian yang tidak berdasarkan transaksi yang sah atau memanipulasi informasi penerima uang. Tingkat risiko akan semakin tinggi ketika prosedur pengembalian tidak membutuhkan persetujuan atau bukti dokumentasi yang cukup. Di situasi ini, perusahaan bisa mengalami kerugian tanpa segera menyadari pangkal penyebabnya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, setiap pengembalian dana harus dilengkapi dengan dokumen yang dapat mendukung alasan pengembalian uang. Perusahaan juga bisa menetapkan batas maksimum nominal yang dapat langsung diproses oleh karyawan serta menetapkan persetujuan tambahan untuk jumlah tertentu. Data mengenai pengembalian dana perlu dicocokkan dengan transaksi penjualan serta barang yang dikembalikan. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan analisis terhadap frekuensi pengembalian berdasarkan periode waktu dan pengguna sistem. Jika terdapat pola yang mencurigakan, transaksi tersebut harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengembalian dana benar-benar didasarkan pada alasan yang sah.

4. Pemalsuan Bukti Pembayaran

Pemalsuan bukti pembayaran dapat terjadi ketika sebuah perusahaan mengandalkan dokumen atau gambar layar sebagai satu-satunya bukti konfirmasi pembayaran. Dalam transaksi yang dilakukan secara digital, bukti pembayaran bisa berasal dari konsumen atau pihak internal, namun dokumen-dokumen tersebut belum tentu dapat membuktikan bahwa uang sebenarnya telah masuk ke dalam rekening perusahaan. Jika staf tidak melaksanakan verifikasi, suatu transaksi bisa dianggap sudah selesai meskipun dana sebenarnya belum diterima. Keadaan ini dapat menyebabkan perusahaan mengirim barang atau mengakui pendapatan sebelum uang tersebut benar-benar terverifikasi.

Oleh sebab itu, proses verifikasi seharusnya dilakukan melalui sumber pembayaran yang terkendali, seperti rekening perusahaan atau sistem pembayaran yang digunakan. Status transaksi sebaiknya diubah menjadi “lunas” hanya setelah adanya verifikasi pembayaran. Akses untuk melakukan perubahan status pembayaran juga sebaiknya dibatasi pada karyawan tertentu. Sistem dapat memberikan sinyal atau pemberitahuan otomatis ketika pembayaran sudah berhasil. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada bukti pembayaran yang bersifat manual serta meningkatkan keakuratan informasi transaksi.

5. Penyalahgunaan Akun Bisnis

Akun bisnis dalam perdagangan sosial memiliki peranan vital karena berfungsi untuk mengatur komunikasi dengan pelanggan, produk, pesanan, serta berbagai aktivitas lainnya. Risiko muncul saat beberapa karyawan menggunakan akun yang sama tanpa adanya identifikasi pengguna yang jelas. Dalam situasi ini, jika terjadi manipulasi transaksi atau perubahan pada informasi, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan tindakan tersebut. Selain itu, karyawan yang sudah tidak lagi bekerja masih dapat mengakses akun jika perusahaan tidak segera mencabut hak aksesnya.

Pengendalian dapat dilaksanakan dengan memberikan setiap karyawan akun masing-masing dan mengatur hak akses sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem autentikasi yang tepat dan melakukan evaluasi akses secara berkala. Bila seorang karyawan berganti posisi atau berhenti, akses harus segera diperbarui atau dicabut. Penggunaan akun perorangan juga meningkatkan tanggung jawab karena setiap tindakan dapat dikaitkan dengan pengguna tertentu. Dengan demikian, menjaga keamanan akun menjadi komponen penting dalam pengendalian risiko keuangan dan operasional.

6. Pengeluaran Dana Tanpa Otorisasi

Pengeluaran uang tanpa izin adalah risiko yang bisa menyebabkan kerugian langsung bagi perusahaan. Risiko ini bisa muncul ketika membayar biaya promosi, membeli barang, biaya operasional, membayar jasa, atau pengeluaran lain. Jika karyawan bisa melakukan pembayaran tanpa persetujuan, perusahaan akan kesulitan untuk memastikan apakah pengeluaran itu benar-benar untuk kepentingan bisnis. Masalah akan semakin parah jika bukti transaksi tidak lengkap atau tidak ada pemeriksaan setelah pembayaran dilakukan.

Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan harus menetapkan batas wewenang berdasarkan jenis dan jumlah transaksi. Pengeluaran dengan jumlah tertentu mungkin membutuhkan izin dari pemilik atau manajer, sedangkan pengeluaran rutin bisa dilakukan oleh karyawan dalam batas yang sudah ditentukan. Setiap transaksi harus memiliki bukti pembayaran dan dokumen yang menjelaskan tujuan pengeluaran. Pemeriksaan setelah transaksi juga penting untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang disetujui. Dengan cara ini, izin dapat berfungsi sebagai alat pengendalian dan bukan hanya sekedar prosedur administratif.

7. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang atau Jasa

Konflik kepentingan bisa muncul saat seorang karyawan yang memilih pemasok memiliki hubungan pribadi atau kepentingan finansial dengan pemasok tersebut. Situasi ini dapat membuat keputusan pengadaan tidak sepenuhnya didasarkan pada harga, kualitas, dan kebutuhan perusahaan. Risiko yang mungkin timbul termasuk pembayaran harga yang lebih mahal, pembelian barang yang tidak cocok, atau pemilihan pemasok yang tidak memberikan keuntungan maksimal untuk perusahaan. Meskipun tidak selalu berarti adanya penipuan, konflik kepentingan bisa menyebabkan kerugian uang dan mengurangi ketidakberpihakan dalam proses bisnis.

Pengendalian bisa dilakukan dengan meminta agar konflik kepentingan diungkapkan dan mendokumentasikan proses pemilihan pemasok. Perusahaan bisa membandingkan beberapa penawaran sebelum mengambil keputusan dan melibatkan lebih dari satu orang dalam proses persetujuan. Mengecek harga pasar dan kualitas barang juga bisa dilakukan agar keputusan pengadaan berdasarkan alasan yang logis. Pendekatan ini penting karena pencegahan terhadap penipuan tidak hanya berfokus pada tindakan setelah kerugian terjadi, tetapi juga pada mencegah keputusan yang bisa merugikan perusahaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Mitigasi risiko keuangan dalam bisnis social commerce adalah hal yang sangat penting untuk melindungi aset, memastikan informasi keuangan akurat, dan menjaga kelangsungan usaha. Ciri-ciri dari social commerce yang mengandalkan transaksi online, berbagai platform, dan peran karyawan dalam mengelola transaksi dapat menimbulkan berbagai risiko. Risiko ini termasuk penipuan seperti manipulasi data transaksi, pencurian uang, penyalahgunaan pengembalian dana, pemalsuan bukti pembayaran, penyalahgunaan akun, dan pengeluaran tanpa izin. Dari pembahasan ini, dapat dilihat bahwa kontrol internal berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dengan cara membagi tugas, membatasi akses, memberikan izin untuk transaksi, rekonsiliasi finansial, mendokumentasikan, memantau, dan menggunakan teknologi yang memiliki jejak audit. Namun, memiliki prosedur kontrol saja tidak cukup untuk melindungi perusahaan dari penipuan, karena seberapa efektif prosedur tersebut sangat bergantung pada seberapa konsisten penerapan, pengawasan, dan penilaian yang dilakukan secara rutin.

Dengan kata lain, bisnis social commerce harus menggunakan sistem kontrol internal yang bersifat mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki. Sistem ini harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan perkembangan usaha. Perusahaan juga perlu lebih ketat dalam mengawasi transaksi keuangan, membatasi wewenang sesuai dengan tanggung jawab pekerja, melakukan pemeriksaan rutin, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan melacak transaksi. Selain itu, sistem saja tidak cukup; mereka juga harus membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan kesadaran di antara karyawan agar pengendalian bisa berjalan baik. Menerapkan kontrol internal secara menyeluruh tidak sepenuhnya bisa menghilangkan

kemungkinan penipuan, tetapi bisa memperkecil peluang terjadinya kecurangan, mempercepat penemuan kesalahan, membatasi kemungkinan kerugian, serta meningkatkan stabilitas finansial dan keberlangsungan usaha social commerce.

DAFTAR PUSTAKA

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2024). A Report to the Nations on Occupational Fraud in 2024. Association of Licensed Fraud Examiners.

COSO is the acronym for Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Integrated framework for internal control. COSO.

Creswell, J. D., & Creswell, J. W. (2018). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: Research Design (5th ed.). Publications by SAGE.

J. A. Hall (2016). Information Systems for Accounting (9th ed.). Learning at Cengage.
Karyono. (2013). Fraud in Forensics. Andy.

Steinbart, P. J., & Romney, M. B. (2018). Accounting Information Systems (14th ed.). Pearson.

Sugiyono. (2019). R&D, Qualitative, and Quantitative Research Techniques. Alphabetical.

Tuanakotta, T. M. (2018). Investigative Auditing and Forensic Accounting. Four Salemba.

Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., and Turban, D. C. (2018). Electronic Commerce 2018: A Perspective on Management and Social Networks. Springer.

Wahyuni, S. (2020). Methodology for Business Research. Andrew.